

HUBUNGAN KERJA PETANI - BURUH TANI DIPEDESAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Oleh: *Wabyuni Apri Astuti*

ABSTRACT

Not only do agricultural technology decrease work opportunity but it fade the institution. The use of agricultural technology cause farmer change their mind to commercialisme. This idea of thinking will influence life order of society, that is the fading of social communication. It's appear on collaboration to between farmer and labor, that is from mutual cooperation to pay system. Moreover, the changing of collaboration between farmer and labor can be influenced by area and communitu relation.

INTISARI

Akibat penggunaan teknolgi pertanian tidak saja menyebabkan kesempatan kerja semakin menciut, akan tetapi juga memudarnya kelembagaan. Penggunaan teknologi pertanian menyebabkan petani berubah kearah pemikiran yang bersifat komersial dan pemikiran tersebut membawa pengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat yaitu memudarnya hubungan sosial. Hal ini nampak pada hubungan kerja petani dan buruh tani yaitu dari kerja gotong royong, hubungan kerja tolong menolong menjadi hubungan kerja upah mengupah. Disamping itu perubahan kelembagaan hubungan kerja petani - buruh tani dapat di pengaruhi luas tanah garapan dan hubungan sosial kekerabatan maupun ketetangaan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris sudah sepantasnyalah sektor pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan, karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Peranan penting sektor pertanian ditandai dengan adanya kenyataan dimana sebagian besar penduduk indonesia

masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Dalam repelita v sektor pertanian tetap memegang peranan sentral. Sesuai dengan GBHN, pembangunan pertanian dalam arti luas perlu terus dikembangkan dan diarahkan menuju tercapainya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Sektor pertanian yang tangguh tersebut akan mendukung tercapainya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki era tinggal landas dalam pembangunan selanjutnya. Melalui pembangunan di

bidang pertanian bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Republik Indonesia, 1989 : 55 - 56)

Menurut Mantra (1991: 39) lebih dari 65 persen penduduk Indonesia berdiam di pedesaan dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian, bagi yang memiliki lahan pertanian, luas lahan pertanian yang dimiliki umumnya sangat sempit. Beberapa penelitian di desa Jaa (Penny dan Singarimbun 1973, dan Mantra 1978) diperkirakan sekitar 50 persen penduduk di daerah pedesaan di Jawa tidak memiliki lahan sawah, sedangkan petani pemilik sebagian besar luas lahannya kurang dari 0,2 hektar.

Selama dua dasa warsa terakhir ini terdapat penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan persentase perkembangan penduduk yang bekerja di sektor pertanian terlihat adanya penurunan, tetapi sektor pertanian masih dominan. Dalam tahun 1971 jumlah penduduk yang terlibat di sektor pertanian sebanyak 66,27 persen kemudian menurun menjadi 55,93 persen pada tahun 1980 dan pada tahun 1985 menjadi 54,66 persen (Aris Ananta 1990: 131, 144,152). Penurunan jumlah persentase penduduk yang terlibat pada sektor pertanian terutama disebabkan perkembangan kegiatan di luar pertanian.

Meskipun secara persentase tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian menurun, tetapi secara absolut jumlahnya semakin besar. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik kesempatan kerja yang dapat disediakan sektor pertanian meningkat yaitu pada tahun 1971 sebanyak 24,93 juta orang

menjadi 28,83 juta pada tahun 1980 dan pada tahun 1985 meningkat menjadi 34,14 juta orang. Kelebihan tenaga kerja di pedesaan makin terasa dengan terbatasnya lapangan kerja diluar bidang pertanian. Oleh karena itu penambahan angkatan kerja yang tertampung di sektor pertanian makin memberatkan daya tampung pertanian dan makin menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja ke taraf yang lebih rendah.

Menurut Cris Manning dan Mikhael Papayungan (1984: 42) meskipun sebagian besar penduduk terserap pada sektor pertanian, namun persentase dari produk domestik bruto yang disumbangkan sektor ini adalah relatif kecil. Hal ini mencerminkan tingkat produktivitas yang masih relatif rendah di sektor pertanian dan mengakibatkan sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidup pada mata pencaharian di sektor ini adalah miskin. Dalam tahun 1987 sumbangan sektor pertanian dalam produk domestik bruto nasional sebesar 23,4 persen (Republik Indonesia 1989; 463).

Disamping itu pertumbuhan penduduk Indonesia relatif cukup tinggi periode 1980-1990 sebesar 1,97 persen dan berkurangnya lahan subur, sehingga mengakibatkan lahan pertanian di pedesaan semakin langka. Untuk meningkatkan produksi pangan bagi penduduk yang terus bertambah, maka di bidang pertanian dilaksanakan modernisasi pertanian yang lebih dikenal dengan nama **Revolusi hijau** dan program Bimas Inmas.

Renovasi hijau mempunyai program panca usaha yaitu pemakaian bibit unggul atau varitas unggul, pengolahan tanah, pemupukan, pembasmian hama serta pengairan. Manifestasi renovasi hijau dengan program bimas telah berhasil meningkatkan produksi beras

dan Indonesia mencapai swasembada beras sejak tahun 1984. Namun demikian gejala yang terjadi di masyarakat desa adalah adanya akumulasi penguasaan tanah dan semakin membesarnya ketunakismaan, sehingga semakin jauh jarak antara petani kaya dan lapisan petani kecil serta kurangnya partisipasi dipihak petani kecil dan miskin.

Menurut Kasriyo (1983: 20) produktivitas tanah mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan faktor luas tanah garapan mempunyai hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh produktivitas tanah dan luas tanah garapan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui teknologi.

Dengan teknologi maju maka cenderung menggantikan tenaga manusia atau dapat mengurangi tenaga kerja. Akibat teknologi baru dalam bidang pertanian menimbulkan perubahan sistem saku menyakup, sewa menyewa, pembagian hasil dan hal-hal sejenisnya (Collier dkk 1973 dan Palmer 1976). Pada waktu panen, sistem bawon banyak digantikan oleh sistem tebasan atau borongan dengan menggunakan tenaga upah dan jumlahnya terbatas.

Penggunaan teknologi baru menyebabkan petani berubah kearah pemikiran yang bersifat komersial. Komersialisasi dalam program modernisasi yang meningkat memberi kesempatan petani lapisan atas mendapat keuntungan dari teknologi baru dan mengabaikan kewajiban tradisional dalam hal pemerataan kerja dan pendapatan (Coller dalam Hayami dan Kikuchi 1981, 155). Dengan semakin komersialnya petani mendorong menurunnya tingkat upah

buruh pemanen. Penurunan upah buruh pemanen dilakukan dengan cara *merubah kelembagaan hubungan kerja dari bawon ke ceblokan*. Dalam sistem ceblokan maka buruh pemanen wajib ikut mengerjakan menanam padi dan menyang tanpa diupah. Perubahan dari sistem bawon menjadi ceblokan/ kedokan juga mengurangi kesempatan kerja bagi buruh tani umumnya, karena yang boleh ikut memanen adalah buruh tertentu. Akibat hubungan kerja petani pemilik dan buruh tani yang berubah menjadi hubungan komersial, maka terdapat pembatasan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Kelembagaan Hubungan Kerja

Membahas hubungan kerja berarti membicarakan pranata sosial yang mengatur hak dan kewajiban antara majikan dalam hal ini sebagai pemberi kerja dengan buruh (pekerja), agar kepentingan mereka dapat terpenuhi. Hal ini berarti hubungan kerja merupakan salah satu bentuk pasar tenaga kerja dalam sektor pertanian Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khususnya dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu membahas pranata sosial berarti membahas tentang kelembagaan. Menurut Soedjatmoko, pengertian kelembagaan adalah:

"Suatu institusi atau lembaga, ialah suatu rangkaian hubungan antara manusia yang teratur dan yang disyabakann secara sosial, yang menntukan hak, kewajiban, dan sifat hubungan dengan orang lain".

Davis dan Nort dalam Hayami dan Kikuchi 1981: 25 mengklasifikasi kelembagaan menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan. SedaLingkungan pranata dasar, yaitu aturan-aturan keputusan dasar dan hak-hak p e m i l i k a n y a n g d a p a t dispesifikasikan kedalam hukum formal, atau prinsip adat kebiasaan yang dianggap suci oleh tradisi.
2. Pranata sekunder, yaitu bentuk persetujuan khusus yang mengatur unit-unit ekonomi dapat bekerjasama dalam pemakaian sumberdaya.

Lingkungan pranata dasar merupakan prinsip-prinsip tradisional yang merupakan nilai kerukunan, seperti tolong menolong, gotongroyong, pemerataan pendekatan. Sedangkan pranata sekunder misalnya bentuk perjanjian khusus dalam hal mengerjakan tenaga pemanenn.

Kelembagaan yang lebih mudah berubah adalah kelembagaan sekunder, misal dalam kelembagaan hubungan kerja aturan-aturan satuan kegiatan, bentuk upah, besarnya upah persatuan kegiatan dan cara pengupahan serta jam kerja (Sunarru 1987: 15). Kelembagaan dapat berubah atau berkembang, baik yang disengaja maupun tidak, karena lembaga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kepentingan bersama.

Dilihat dari satuan kegiatan, dalam hubungan kerja ada borongan dan harian. Kegiatan borongan adalah tenaga kerja dibayar berdasarkan pada satuan hasil kerja, sedangkan pada satuan kegiatan kerja harian pembayaran tenaga kerja dibayar pada jumlah hari bekerja.

Bentuk hubungan kerja di bidang pertanian dilihat dari satuan kegiatan (borongan, harian) dan keterikatan buruh yakni ada buruh langganan/tetap

dan buruh bebas, dapat diekompokkan empat bentuk hubungan kerja, yaitu: pertama, buruh tani langganan dengan upah hariann, kedua buruh tani langganan dengan upah borongan, keritga buruh tani bebas dengan upah harian, dan keempat buruh tani bebas dengan upah borongan.

Petani dengan pemilikan lahan garapan yang luas, cenderungann memilih mengupah buruh dengan satuan kegiatan borongan, hal ini disebabkan agar pekerjaan cepat selesai dan tidak memerlukan pengawasan ekstra. Dengan demikian petani yang memiliki lahan garapan yang luas memperkerjakan buruh tani langganan. Sebaliknya petani yang memiliki lahan garapan sempit biasanya dikerjakan tenaga kerja keluarga, jika tenaga kerja keluarga tidak tersedia maka biasanya digunakan tenaga kerja buruh bebas dengan satuan kegiatan harian.

Studi tentang hubungan kerja yang pernah dilakukan misalnya oleh Colter tahun 1969 (Norman Long, 1977) meneliti hubungan kerja di pedesaan Peru. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa di pedesaan Peru. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa adanya pembangunan di daerah terpencil menjadi daerah terbuka menyebabkan perubahan pola hubungan buruh-majjikan.

Perubahan pola hubungan buruh-majjikan karena perubahan dari daerah terpencil menjadi terbuka dapat dilihat pada gambar berikut.

Pola I

Pola II

P = Patron

S = Sub Ordinate

Dari gambar di atas dapat dijelaskan, pada pola I terjadi di daerah terpencil dimana buruh (S) sepenuhnya tergantung pada majikan (P) dan hubungan antara buruh terjadi melalui majikan. Sedangkan pada pola II terjadi di daerah terbuka, dimana buruh dapat saling berhubungan langsung dan mempunyai lebih dari satu majikan.

Studi lain memberikan gambaran perubahan posisi ketergantungan dan isolasi, yaitu pada pola I segala informasi untuk buruh (S1, S2, S3, dan S4). Namun pada pola II kedudukan majikan (P1) menjadi lemah karena adanya kekuatan tandingan, yakni adanya hubungan antara buruh dengan (S1, S2, S3, S4) dengan majikan lain (P2, P3) dan adanya hubungan sesama buruh (Sunarru, 1987: 18)

Sejak tahun 1960 an, revolusi hijau telah dilaksanakan di Indonesia dan dapat meningkatkan produksi tanaman pangan terutama beras. Namun terdapat gejala perubahan kelembagaan hubungan kerja yang cenderung mempersempit kesempatan kerja bagi buruh tani, misal buruh panen dengan ani-ani diganti dengan sistem tebasan, menumbuk padi dengan lesung diganti dengan mesin penggiling padi dan sebagainya.

Perubahan Kelembagaan Hubungan Kerja

Perubahan kelembagaan dalam hal ini hubungan kerja petani majikan dan buruh tani dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dapat terjadi disebabkan produktivitas tanah dan luas tanah garapan.

Pengaruh produktivitas tanah dan luas tanah garapan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui teknologi. Perubahan produktivitas tanah yang berpengaruh positif dan

nyata karena adanya adopsi bibit unggul, perbaikan pengairan, penggunaan pupuk kimia, pengolahan tanah yang lebih intensif. Dalam hal luas tanah garapan yang berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dibayar terjadi antara lain oleh kecenderungan ahwa petani luas cenderung menggunakan teknologi yang dapat menggantikan tenaga kerja seperti penggunaan ternak, traktor dan mekanisasi pemeliharaan tanaman (Kasryno 1983, 18). Munculnya sistem panen borongan serta pengolahan tanah dengan menggunakan traktor menyebabkan semakin sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.

Dari penelitian Kasryno, 1983-20 gesarnya pengaruh produktivitas tanah terhadap jumlah tenaga kerja ditunjukkan koefisien regresi sebesar 0,618, dan selanjutnya luas tanah garapan (koefisien regresi sebesar -0,592). Hal ini berarti bahwa apabila ada perubahan satu persen (berkurang atau bertambah) jumlah tenaga kerja dibayar sebesar 0,618 persen; sedangkan untuk luas tanah garapan, apabila ada perubahan satu persen (bertambah atau berkurang) akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja dengan arah yang berlawanan (berkurang atau bertambah sebesar 0,592 persen).

Dalam hal luas tanah garapan melalui teknologi yang digunakan dapat mempengaruhi hubungan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Bagi petani luas cenderung menggunakan teknologi yang mempengaruhi hubungan kerja. Penggunaan traktor dapat merubah suatu kegiatan bekerja di sawah dari kegiatan harian yang dikerjakan manusia dan tenaga ternak menjadi borongan dengan menggunakan traktor dan dapat mengolah tanah dengan

cepat. Dengan adanya teknologi baru, maka petani yang mempunyai tanah garapan luas, cenderung mengupah buruh dengan sistem borongan. Bagi petani dengan tanah garapan yang sempit biasanya dikerjakan dengan menggunakan tenaga kerja keluarga, jika tenaga kerja keluarga masih kurang, maka mencari buruh dengan upah harian. Traktor mempunyai pengaruh mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja pertanian khususnya bagi buruh tani pengolah tanah. Hal ini ditunjukkan penelitian di daerah Indramayu Jawa Barat Pada akhir tahun 1975, bahwa dengan digunakannya traktor, tenaga kerja yang dapat dihemat 84 persen atau 300 jam kerja orang apabila dibandingkan dengan hanya menggunakan tenaga kerja manusia saja. Apabila dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja ternak, tenaga kerja dapat dihemat sebesar 58 persen atau 75 jam kerja orang. Jadi penggunaan traktor dalam mengolah tanah berpengaruh terhadap penggunaan tenaga kerja.

Perubahan kelembagaan hubungan kerja disebabkan hubungan timbal balik antara perubahan teknologi, sumberdaya alam dan penduduk (Vermon W Ruttan 1985, 121). Hubungan timbal balik tersebut dapat dijelaskan adanya sistem agama di Philipina.

Sistem tradisional hunusan, yang mirip dengan sistem bawon, telah diganti dengan sistem gama. Menurut sistem gama, pekerjaan untuk memanen hanya boleh dilakukan oleh para pekerja yang menyangi sawah tanpa menerima upah. Munculnya sistem gama dimaksudkan untuk menurunkan tingkat upah, panen, sistem gama ini menemui sedikit tantangan jika dibandingkan dengan penurunan

langsung upah panen. Menurut Hayami dan kikuchi sistem gama dipilih, karena dipandang dari prinsip-prinsip moral tradisional di desa, seperti tolong menolong dan saling berbagi pendapatan, tetap mempertahankan tradisi bagi hasil bagi yang ikut memanen. Dengan demikian tampaknya sistem gama lebih dianggap sah dan wajar oleh masyarakat desa di Philipina.

Teknologi baru di bidang pertanian dan adanya pengenalan bibit padi baru di bidang pertanian mempengaruhi sumberdaya alam dan dapat meningkatkan produksi padi. Adanya peningkatan jumlah produktivitas produktivitas tanah, usaha ini tampak dalam pengembangan dan penyebaran teknologi benih, pupuk dan irigasi.

Perubahan dalam penyediaan sumber daya dan teknologi menimbulkan tekanan pada pranata di desa. hal ini dapat dicontohkan sistem bawon tradisional di Jawa, memberi peluang kepada semua anggota masyarakat dapat memanen padi denan ani-ani dan menerima bagian dari hasilnya, telah diganti dengan sistem tebasan. Demikian pula hasil penelitian di Jawa Barat menunjukkan bahwa terjadi perubahan kelembagaan hubungan kerja panen padi dari sistem bawon menjadi ceblokan.

Menurut Soentoro (1982: 42) kegiatan buruh ceblokan yang ada di salah satu desa di Jawa Barat meliputi kegiatan tanam dan panen dengan mendapat imbalan upah seperenam dari hasil panen. Berlakunya sistem ceblokan nampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Dari segi petani dengan sistem ceblokann, tidak perlu menyediakan uang tunai, ada jaminan memperoleh buruh dan bagi buruh ada jaminan mendapat pekerjaan.

Dalam tatanan cablokan berlaku aturan bahwa orang yang boleh memanen dengan mendapat bawon hanya orang-orang yang dulu turut mengerjakan lahan pertanian di petak yang bersangkutan dan tidak diberi upah. Gejala ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tekanan penduduk atas lahan pertanian dapat mempengaruhi kelembagaan. Jumlah buruh tani pada sistem cablokan dibatasi sesuai dengan kebutuhan.

Buruh tani yang hanya mengandalkan tenaganya, maka untuk meningkatkan pendapatan mereka berusaha mendapatkan jam kerja dan hari kerja yang lebih banyak. Bagi buruh tani yang sudah punya langganan biasanya mempunyai hari kerja yang lebih banyak dibanding dengan buruh bebas. Oleh sebab itu biasanya buruh tani langganan mempunyai satu petani majikan, tetapi untuk buruh tani bebas karena ingin menambah hari kerja maka cenderung mempunyai lebih dari satu petani majikan.

Corak hubungan sosial yang ada dalam masyarakat antara petani dan buruh tani, seperti hubungan kekerabatan, ketetanggaan sedusun, ketetanggaan beda dusun, dapat mempengaruhi hubungan kerja. Dalam hubungan sosial petani dan buruh tani sering menjadi pertimbangan siapa buruh taninya, berapa jumlahnya, keterikatan kerja, upah dan sebagainya.

Didalam sektor pertanian besarnya penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas lahan pertanian, peroduktivitas tanah, intensitas tanaman dan hubungan kerja. Masalah ketenagakerjaan pedesaan seringkali sulit dianalisis, karena kerumitannya. Kenyataan yang ada bahwa pekerjaan di pedesaan sering melakukan jenis pekerjaan lebih dari

satu macam, bahkan pada waktu yang sama mengerjakan jenis pekerjaan yang berbeda.

Terbatasnya kesempatan kerja di bidang pertanian, menyebabkan banyak buruh tani mencari tambahan pekerjaan diluar bidang pertanian. Tambahan pekerjaan tersebut dapat diperoleh di dalam desa atau diluar desa. Bagi buruh tani yang mendapatkan pekerjaan tambahan diluar desa, maka mereka umumnya memilih mengadakan mobilitas non permanen, misalnya ulang-alik.

Walaupun kehidupan di desa semakin sulit karena kesempatan kerja terbatas, namun sebagian masyarakat desa tetap tinggal di desa. Hal yang mengikat penduduk tetap tinggal di desa adalah corak masyarakat di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat desa merupakan suatu "gemeinschaft" yang memiliki unsur gotong royong yang kuat, hal ini penduduk desa merupakan face to face group, mereka saling mengenal betul seperti mengenal dirinya sendiri (Bintarto, 1983: 15).

Menurut Mantra (1985, 176) masyarakat desa tetap memilih tinggal di desa disebabkan oleh:

1. Jalinan persaudaraan diantara warga desa sangat erat. Eratnya hubungan ini terutama terlihat diantara sanak keluarga dan keluarga dekat.
2. Sistem gotong royong masyarakat pedesaan Jawa sangat erat, tiap warga desa merasa mempunyai tugas moral untuk saling membantu.
3. Penduduk sangat terikat pada tanah pertanian. Di daerah pedesaan terdapat anggapan bahwa pemilik tanah mempunyai status yang lebih tinggi.

4. Penduduk sangat tertarik pada desa dimana mereka dilahirkan.

Dengan alasan tersebut, penduduk tetap tinggal di desa, dan bagi buruh tani yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar desa untuk menambah pendapatannya, maka mereka memilih mengadakan mobilitas ulang alik karena terikat pada pertanian.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kerja

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hubungan kerja pada bidang pertanian dapat dipengaruhi oleh sumberdaya alam dalam hal ini adalah luas lahan, produktivitas, melalui teknologi serta hubungan sosial petani dan buruh tani. Petani dengan tanah garapan luas, akan mengolah tanah garapannya secara cepat dengan menggunakan traktor. Dengan cara ini terjadi perubahan hubungan kerja, yang semula digunakan tenaga manusia dan ternak untuk mengerjakan sawah dengan kegiatan harian berubah menggunakan traktor. Penggunaan traktor menyebabkan petani mengupah dengan satuan kegiatan borongan agar pekerjaan cepat selesai. Petani dengan luas tanah garapan sempit, biasanya menggunakan tenaga kerja buruh bebas dengan satuan kegiatan harian.

Meningkatnya produksi padi juga mempengaruhi hubungan kerja petani buruh tani. Perubahan hubungan kerja panen padi bawon dimana buruh tani bebas memanen padi dengan ani-ani, menjadi ceblokan (di Jawa Barat) dimana buruh tani yang ikut memanen adalah mereka yang mengerjakan tanam padi dan menyiangi tanpa diupah. Sejak tahun 1970 an sistim bawon berubah menjadi panen tebasan. Dalam sistim tebasan, penebas biasanya memperkerjakan jumlah buruh yang

relatif sedikit dan biasanya berasal dari luar desa, dengan demikian tebasan mengurangi kesempatan kerja bagi buruh tani. Meningkatnya produksi padi karena teknologi baru dapat mempengaruhi perubahkan cara pengupahan, bentuk upah dan besarnya upah satuan kegiatan.

Adanya program pemerintahan yaitu perkembangan teknologi, maka muncul pertanian tanam serempak dan borongan sehingga dapat mempengaruhi hubungan kerja petani buruh tani.

Buruh tani kerja dengan mengandalkan tenaganya, berusaha mendapatkan hasil yang maksimal, oleh sebab itu buruh tani bebas berusaha menambah jumlah petani majikan. Namun usaha ini dipengaruhi bentuk hubungan kerja petani buruh tani, ternyata buruh tani bebas lebih leluasa mencari buruh majikan lebih banyak dibanding buruh tani langganan, tetapi mempunyai resiko tiak mendapatkan petani majikan. Demikian pula petani yang memiliki tanah garapa luas, cenderung mengupah buruh dengan satuan kegiatan borongan dan petani dengan luas tanah garapan sempit akan menggunakan tenaga kerja kelaurga atau menggunakan tenaga buruh bebas dengan upah harian.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan kerja petani-buruh tani adalah hubungan sosial. Corak hubungan sosial petani-buruh tani yang mempengaruhi hubungan kerja misalnya hubungan kekerabatan, hubungan ketetanggaan baik dalam satu dusun maupun diluar dusun, hubungan ketetanggaan lain desa yang dekat dan sebagainya. Dalam hubungan sosial sering menentukan bagi petani pemberi kerja untuk menentukan buruh yang digunakan.

Terbatasnya kesempatan kerja di sektor pertanian menyebabkan buruh tani berusaha mencari tambahan pendapatan di luar sektor pertanian. Namun karena tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah dan banyak yang tidak memiliki ketrampilan, maka hal ini menjadi kendala buruh tani untuk mendapatkan tambahan pendapatan di luar sektor pertanian.

Kesimpulan

Teknologi pertanian mempengaruhi hubungan kerja, hal ini dapat merugikan buruh tani sebab kesempatan kerja semakin menyempit. Menyempitnya kesempatan kerja disebabkan bertanam padi lebih serentak, hilangnya lembaga bawon, meluasnya teasan, dan penggunaan traktor.

Perkembangan teknologi pertanian juga mendorong petani berubah makin rasional dan komersial. Hal ini nampak pada pengelolaan usaha tani misalnya membatasi jumlah buruh tani, mudahnya hubungan sosial sebagai contoh hubungan kerja buruh tani dulu dijalankan secara gotong royong, kekeluargaan menjadi hubungan upah mengupah.

Pemilikan luas tanah garapan dapat mempengaruhi bentuk hubungan kerja, dimana petani yang memiliki tanah garapan yang luas, cenderung mengupah buruh tani dengan satuan kegiatan borongan dan biasanya dikerjakan oleh tenaga buruh langganan. Petani dengan pemilikan tanah garapan yang sempit cenderung menggunakan tenaga kerja keluarga atau menggunakan tenaga buruh bebas dengan upah harian.

Hubungan sosial petani-buruh tani, misalnya hubungan kekerabatan, ketetanggaan dapat menentukan petani dalam memilih buruh tani yang digunakan.

Dengan semakin terbatasnya kesempatan kerja di bidang pertanian maka buruh tani berusaha mencari pendapatan tambahan dari sektor diluar bidang pertanian.

Saran

Berkembangnya teknologi baru di bidang pertanian dan hubungan kerja yang ada belum dapat meningkatkan kesempatan kerja sebagian besar buruh tani. Oleh sebab itu perlu usaha meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan buruh tani.

Hubungan sosial seperti kekerabatan, ketetanggaan, dan nilai kerukunan perlu dipertahankan karena hal ini menentukan tenaga kerja/buruh tani yang digunakan.

perlu usaha meningkatkan kemampuan, ketrampilan petani dan buruh tani, sehingga mereka dapat berusaha di luar bidang pertanian dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Daftar Pustaka

- Aris Ananta, (Penyunting), 1990, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.J Suhardjo, 1988. *Peranan Kelembagaan Dalam Hubungannya Dengan Komersialisasi Usabatani dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus di Daerah Pegunungan Wilayah Kab. Banjarnegara Jawa Tengah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- AT Birowo, 1983. *Sitasi Tenaga kerja Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian*, Dipersiapkan untuk lokakarya nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja, 12-14 Januari 1983 di Jakarta.
- Bintarto, 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chris Manning dan Mikhael Papayungan, 1984. *Analisa Ketenagakerjaan di Indonesia Berdasarkan Data Sensus Penduduk Tahun 1971-1980 Buku I*. Kerjasama BPS dan Pusat Penelitian Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Faisal Kasryo, 1983. *Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian dan Tingkat Upah*, Studi Dinamika Pedesaan (Surbey Agro Ekonomi).
- (Penyunting), 1984. *Propek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ida Bagus Mantra, 1991. Profil Penduduk Indonesia Menjelang Era Tinggal Landas dalam *Buletin Penelitian kebijakan Kependudukan Populasi Nomor 1 Volume 2 Tahun 1991*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- , 1985. *Pengantar Studi Demografi*, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1982. *Dalam Sosiologi Suatu Pengantar*, Soerjono Soekanto. CV. Rajawali, Jakarta.
- Norman Long, 1977. *An Introduction to The Sociology of Rural Development*. Tavistock Puublications.
- Penny, DH dan Masri Singarimbun, 1973. *Population annd Poverty in Rural Java: Some Artibemetics from Sribarjo*, New York: Departemant of Agricultural Economics, Cornel University.
- Republik Indonesia, 1989. *Repelita Kelima 1989/90 - 1993/94*, Jakarta.
- Sunarru Samsi Hariadi, 1987. *Kelembagaan Hubungan Kerja dan Kesempatan Bekerja Serta Pendapatan Buruh Tani di Pedesaan* (Studi Kasus di Kalurahan Donotirto Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Tesis Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor*.
- Soentoro, dkk, 1982. *Perkembangan Kesempatan Kerja dan Hubungan Kerja Pedesaan: Studi Kasus di Empat Desa di Jawa Barat*, Studi Dinamika Pedesaan (Yayasan Survei Agro Ekonomi), Bogor.
- Vernon W. Ruttan, 1985. *Tiga kasus Terjadinya Pembangunan Kelembagaan Dalam Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Penyunting Faisal Kkasryno dan Joseph F. Stepanek, Pt Gramedia, Jakarta.
- Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, 1981. *Asia Village Economy at The Crossroads*, University of Tokyo Press.